

MATA KULIAH KEBIJAKAN KEHUTANAN

PENGANTAR KEBIJAKAN KEHUTANAN

Oleh Prof.Markum

Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian Unram





KONDISI FAKTUAL KEHUTANAN DI INDONESIA

1/ Status Kawasan Hutan

- Milik Negara
- Hutan Negara, Hutan Hak, Hutan Adat
- Diatur dengan Perundang-undangan

3/ Masalah

- Degradasi hutan dan lahan
- Konflik dalam pengelolaan hutan
- Perubahan Iklim

2/ Potensi

- Luas Tutupan Hutan 130 juta ha
- Memiliki Keanekaragaman hayati sangat tinggi
- Sebagai aset ekonomi, lingkungan, sosial, politik

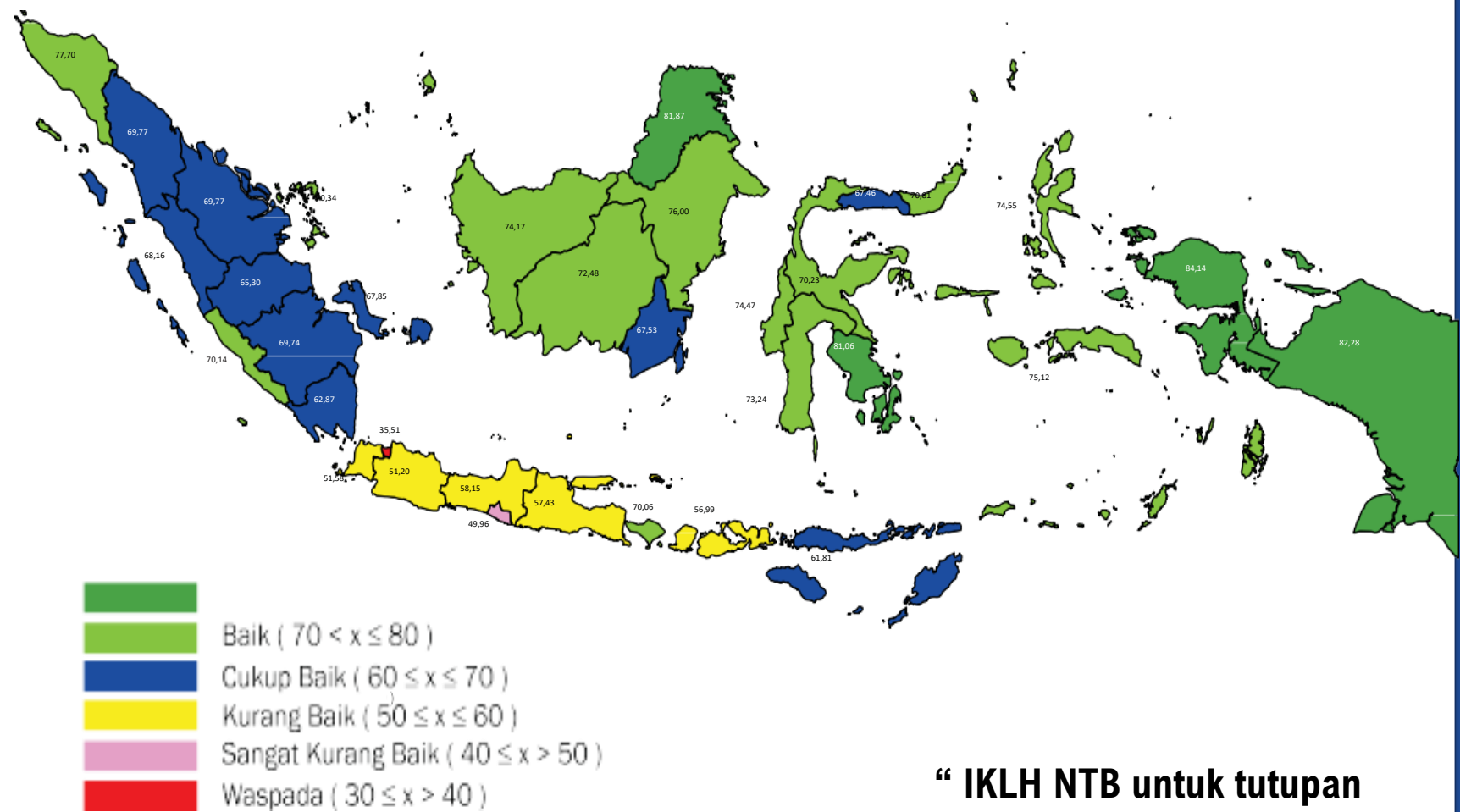
4/ Kebijakan Kehutanan

- Dinamika Kebijakan Kehutanan
- Sebagai solusi masalah, namun juga bisa menyebabkan masalah
- Tarik ulur kepentingan antara konservasionis dengan kepentingan ekonomi /bisnis

Profil Hutan di NTB



KONDISI LHK TERKINI DI NTB

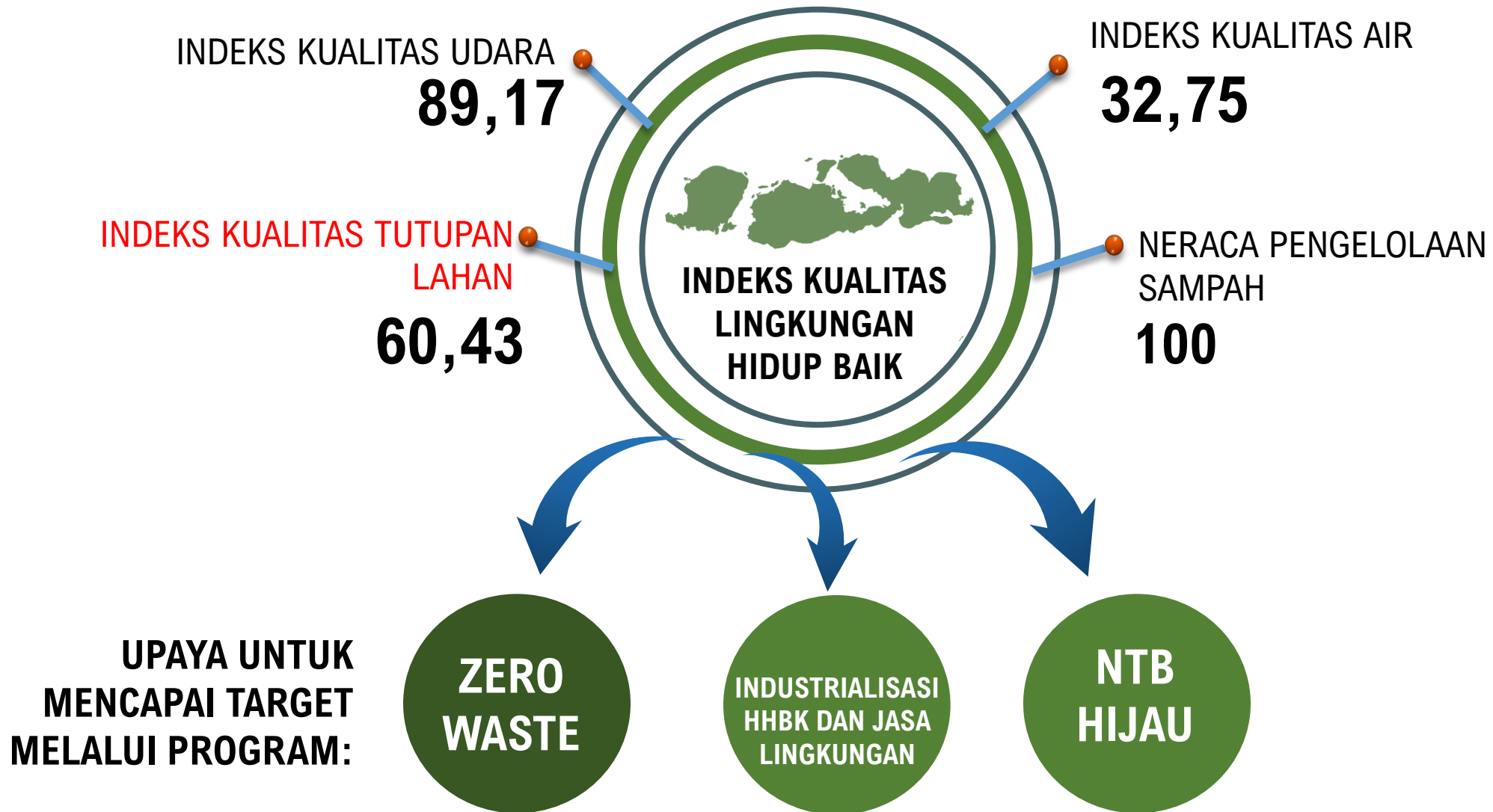


“ IKLH NTB untuk tutupan lahan masuk Kategori Kurang Baik ”

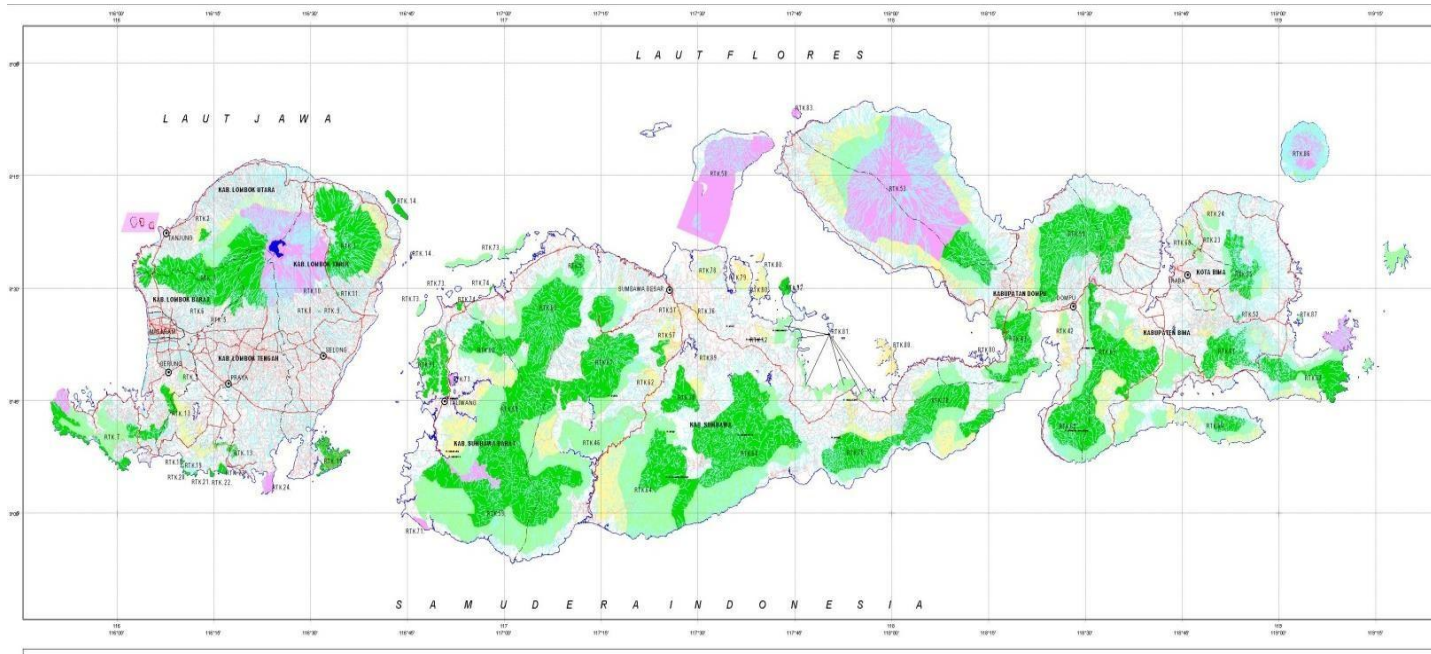
PENYEBAB



TARGET PEMBANGUNAN LHK NTB



KONDISI HUTAN DI NTB



41,9 %

HUTAN LINDUNG
(449.141,35 Ha)

41,8 %

HUTAN PRODUKSI
(448.945,08 Ha)

16,3%

**HUTAN
KONSERVASI
(173.636,40 Ha)**

- **1.071.722,83 Ha wilayah NTB adalah Kawasan hutan**
 - **96.238,24 Ha hutan dan lahan di NTB termasuk lahan sangat kritis**
 - **87% Kawasan Hutan Belum Optimal pengelolaannya**
- “Kedepan akan diupayakan optimalisasi pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan”**

UPAYA PERLINDUNGAN HUTAN



Operasionalisasi
Perda Pengelolaan
Hutan



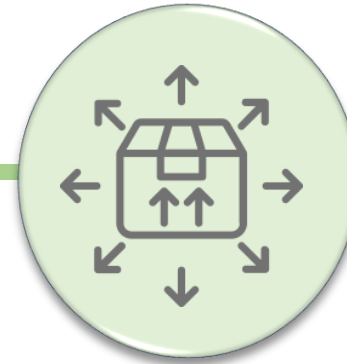
Melaksanakan
**Patroli Rutin 24/7
dan 7 Hari
seminggu** serta
patroli Gabungan



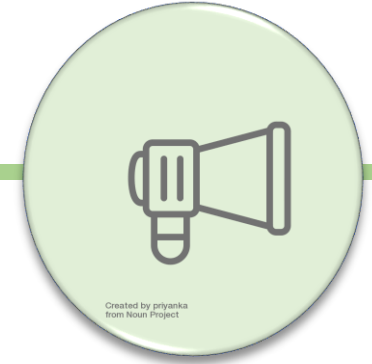
Membentuk Tenaga
Pengamanan Hutan
sebanyak 505 org



Penjagaan di setiap
lintasan peredaran
kayu ilegal
(perbatasan kab,
pelabuhan, & desa
di sekitar kawasan)



Penanganan
peredaran
hasil hutan



Penyuluhan dan
Pemberdayaan
masyarakat

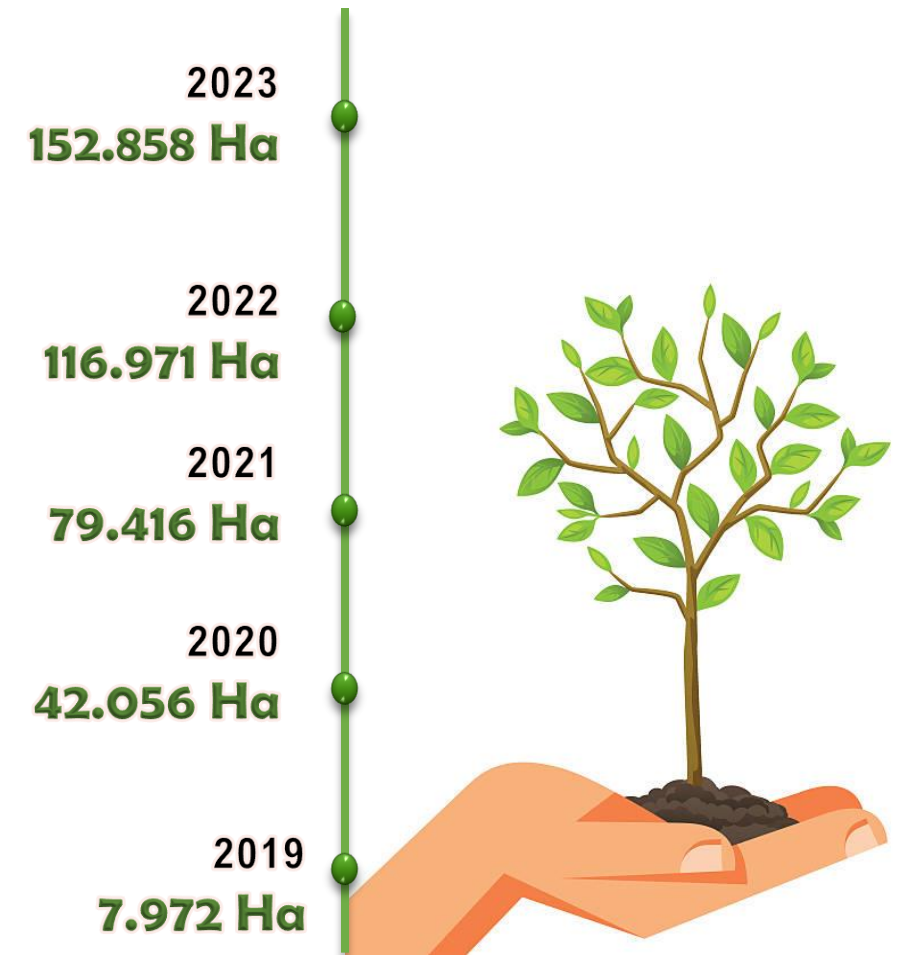
**Tenaga Pengamanan
Kehutanan Tahun 2019**



Tahun 2019 : 619 org
Polhut : 114 org
Pamhut : 505 org

UPAYA PENUTUPAN LAHAN KRITIS MELALUI: “NTB HIJAU”

Pelibatan para pihak dalam upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang akan berfokus pada :



Target RHL lebih dari 100.000 hektar s/d Tahun 2023

“Dengan Jenis Tanaman produktif yg memperhitungkan kesesuaian lahan dan pasar untuk mendukung Industrialisasi”

REVITALISASI PERHUTANAN SOSIAL UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENUJU NTB HIJAU

Area Perhutanan Sosial Sebagai Sumber Bahan
Baku Industri Kehutanan Di NTB

11%

5.209 Ha
Kerjasama Kehutanan

7%

3.152 Ha
Hutan Tanaman Rakyat

34%

15.571 Ha
Kemitraan Kehutanan

48%

22.232 Ha
Hutan Kemasyarakatan

Skema perhutanan sosial dengan meningkatkan
pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan
melalui :

1. Agroforestry

**2. Industrialisasi HHBK
oleh dinas LHK NTB**

“

Dibutuhkan bibit HHBK unggul untuk
mendukung industrialisasi kehutanan
yang akan melibatkan 34.402 KK

”



DUKUNGAN YANG DIHARAPKAN DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN

3/ Perlindungan Hutan dan KSDAE

- Dukungan sarpras Penanganan Kebakaran Hutan
- Penguatan Kapasitas PPNS, 10 org/tahun
- Masyarakat Mitra Polhut di Desa Sekitar Kawasan
- Dukungan penyelenggaraan SeaBRNet Tahun 2020

1/ Pengembangan Kawasan Konservasi

- Pengembangan Kemitraan Konservasi
- Evaluasi Pemegang IPPA
- Percepatan Penetapan Taman Nasional Moyo Satonda
- Rehabilitasi Jalur tracking Rinjani dan penyediaan air dari danau

4/ Rehabilitasi Hutan dan Lahan

- Pembangunan Kebun Bibit Desa, untuk wilayah KEK Mandalika, Geopark Rinjani dan Tambora
- Reboisasi 10.000 Ha/tahun, salah satunya dengan Jenis Bambu Tabah (bambu pangan)
- Bantuan Bibit produktif, 300.000 btg/tahun

2/ Pemantapan Kawasan Hutan

- Penyelesaian Tukar Menukar Kawasan untuk wilayah Kabupaten Dompu dan Sumbawa
- Percepatan Proses Revisi Penunjukkan Tahura
- Percepatan Penetapan Rencana Pengelolaan Danau Segara Anak dan Danau Rawa Taliwang

5/ Optimalisasi Pemanfaatan Potensi SDH

Percepatan pengembangan Perhutanan Sosial dengan skema *Agroforestry* seluas 10.000 Ha dan percepatan SK Kulin (94 kelompok)

- Peningkatan visibilitas di kawasan konservasi, utamanya lingkup Geopark dan Cagar Biosfer (Rinjani - Samota) spt: Pusat Informasi, Papan Interpretasi dan lain – lain.
- Evaluasi Pemegang Ijin Pemanfaatan Hutan dan Pemanfaatan Kawasan

MATERI KULIAH KEBIJAKAN KEHUTANAN

1

- Pengantar Kebijakan Kehutanan
- Prinsip-prinsip Dasar Kebijakan Kehutanan

2

- Mengenal produk Kebijakan Kehutanan
- Sistem Hirarki Produk Kebijakan

3

- Sejarah dan dinamika Kebijakan dan perubahan kebijakan kehutanan

4

- Substansi dan materi Kebijakan Kehutanan
- Kinerja Kebijakan Kehutanan

5

- Masalah dan Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Kehutanan

6

- Kebijakan Kehutanan di Daerah : Produk, Implementasi dan Tantangan

TIM PENGAJAR

Prof. Markum
Dr. Andi C Ichsan

Korespondensi

Email : markum.exp@gmail.com

WA : 087865740044

Website: <http://markumgitu.com>





TERIMA KASIH